



Kenaikan TDL:
Menuju
Keresahan Sosial ?

SEJAK DUA BULAN silam, pemerintah berencana akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dengan prosentase yang berbeda antara kenaikan bagi kalangan industri dan kalangan rumah tangga. Keterkejutan bagi kalangan pengusaha kian bertambah ketika pemerintah merencanakan kenaikan tarif yang bervariasi bagi kalangan industri yang dinilai akan menjebak kalangan usaha ke dalam jurang kebangkrutan. Rencana ini tidak saja telah menimbulkan protes di kalangan masyarakat menengah ke bawah, namun juga kalangan pengusaha.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua rencana strategi kenaikan tarif listrik yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Pertama, tarif listrik akan naik pada April 2006 sebesar 15% bagi konsumen perumahan berdaya 1300 watt ke atas dan industri besar saja. Kedua, rencana kenaikan listrik rata-rata 10% bagi konsumen perumahan saja di bulan Mei 2006. Saat ini perdebatan mengenai besarnya kenaikan tarif listrik masih diperdebatkan antara PLN, pemerintah, dan DPR.

Satu hal yang pasti, kedua opsi yang ada akan kembali memicu aksi protes dari kalangan masyarakat. Sejauh ini, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai rencana naiknya tarif listrik akan menggandakan beban produksi pengusaha. Djimanto, Sekjen APINDO, mengungkapkan bahwa, saat ini para pengusaha

tengah menanti sikap pemerintah berkaitan dengan hasil BPK terhadap PLN. Lebih jauh, Djimanto tidak menyangkal kemungkinan bahwa kalangan pengusaha akan mengambil langkah PHK besar-besaran untuk mengurangi beban perusahaan jika tarif listrik naik. Ia berharap pemerintah menunda kenaikan tarif dasar listrik hingga kuartal ke III 2006, dan besar kenaikan tarif tidak lebih dari sepuluh persen untuk mengurangi kemungkinan dampak buruk akibat kenaikan tersebut.

Di samping itu, jika perusahaan-perusahaan besar melakukan PHK setelah kenaikan tarif listrik sebagai cara bertahan dari kenaikan biaya produksi, maka dampaknya akan pada meningkatnya angka pengangguran. Jika angka pengangguran terlalu tinggi, maka kondisi ini dapat menimbulkan lahirnya keresahan sosial akibat turunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ketika rakyat tidak lagi memiliki daya dan akses terhadap sumber ekonomi, maka potensi aksi kejahatan di perkotaan akan membesar karena secara harafiah rakyat memerlukan kebutuhan pokok untuk tetap bertahan hidup. Bukan tidak mungkin aksi-aksi pengutulan yang kini tengah mewabah di pusat-pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta akan terus membesar dan menjatuhkan iklim usaha di Indonesia akibat aksi-aksi kejahatan ke depannya. (SJ)



Selamat Datang ISCPP Indonesia Chapter

INGIN BERMAIN angklung?. Anda tidak dapat memainkannya seorang diri, melainkan harus bersama-sama. Anda tidak akan dapat mencegah kejahatan seorang diri. Anda harus bekerja sama untuk mencegah kejahatan. Pantun ini menjadi kalimat pembuka rangkaian acara pendirian *International Society of Crime Prevention Practitioner (ISCPP) Indonesia Chapter* pada 28 Februari 2006 lalu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

ISCPP *Indonesia Chapter* diinisiasi oleh tiga orang pakar dan praktisi *security*, Bima J. Dwinanda, Toto Trihamtoro, dan Agus Muldya, setelah mereka menyelesaikan ujian *Crime Prevention Practitioners* bersertifikat resmi yang diselenggarakan oleh ISCPP di Subic,

Filipina, pada tahun 2005. Bima J. Dwinanda selaku *President ISCPP Indonesia Chapter* mengungkapkan bahwa, *ISCPP Indonesia Chapter* kini memiliki 14 anggota yang memiliki latar belakang sebagai pakar dan praktisi *security*.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan *ISCPP Singapore Chapter*, *Philippine Chapter*, *NCPC Singapura*, *Kepolisian Nasional Filipina*, dan sejumlah pakar *security* lainnya di kawasan ASEAN. Bea J. Rojo, *President ISCPP Philippine Chapter* mengungkapkan bahwa *ISCPP Indonesian Chapter* masih perlu sedikit bersabar untuk diakui secara resmi sebagai bagian dari *ISCPP International*, karena *ISCPP Asia Pacific Region* yang diketuai oleh

Abdul Aziz kini tengah berbenak agar lembaga ini tidak lagi seperti bergantung ke *ISCPP International*. Sejauh ini, komunikasi antara *ISCPP Asia Pacific Region* dengan *ISCPP International* masih terbangun melalui *ISCPP Philippine Chapter* selaku kendali *ISCPP Asia Pacific Region* berada di tangan *ISCPP Singapore Chapter*.

ISCPP Indonesia Chapter sendiri akan memenuhi prosedur legal sebagai lembaga non-pemerintah berkekuatan hukum resmi di Indonesia. Sekeberadaannya lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai *crime prevention* di Indonesia. Selamat datang *ISCPP Indonesia Chapter*.